

**PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan
Tahun 2019)**

***THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE COMPETENCIES AND THE APPLICATION
OF REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEMS TO THE QUALITY OF
REGIONAL FINANCIAL STATEMENT***

(Empiris Study on Regional Government Work Units South Tangerang City 2019)

Andhika Fadillah¹, Sri Rahayu, S.E., M.Ak., Ak., CA²

¹Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹andhikafadillah@telkomuniversity.ac.id, ²srirahayu@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki peran penting bagi suatu daerah dalam menyediakan informasi sebagai output dari transaksi keuangan daerah. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan kinerja manajerial maupun organisasional agar tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan apa yang diinginkan. Laporan keuangan yang berkualitas ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan, sehingga laporan keuangan harus memenuhi karakteristik yang juga sebagai penilaian laporan keuangan berkualitas.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif dan bersifat kausal. Sampel penelitian ini adalah bagian keuangan/akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan. Teknik penentuan sampel menggunakan metode teknik sensus sampling. Data yang digunakan peneliti dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan diawali dengan uji asumsi klasik.

Berdasarkan hasil penelitian telah diperoleh hasil pengaruh kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan. Sedangkan, secara parsial kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan serta penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

Kata Kunci: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Abstract

The Regional Government Financial Report has an important role for a region in providing information as an output of regional financial transactions. This information can be utilized by users of financial statements in making managerial and organizational performance decisions so that the objectives to be achieved are in accordance with what is desired. Quality financial statements participate in making decisions, so financial statements must meet the characteristics that are also as evaluations of quality financial statements.

This research is a descriptive and causal research. The sample of this study is the financial / accounting section of the Regional Work Unit of South Tangerang City. The sampling technique uses the census sampling technique. The data used by researchers were analyzed using the method of multiple linear regression analysis and begins with the classical assumption test.

Based on the results of the study, it was found that the effect of HR competence and the application of the regional financial accounting system simultaneously had an effect on the quality of the financial statements of the South Tangerang Regional Work Unit. Whereas, partially human resource competency has a significant positive effect on the quality of the financial statements of the South Tangerang Regional Work Unit and the

application of the regional financial accounting system has a partial effect on the quality of the regional financial report of the South Tangerang Regional Work Unit.

Keywords: *Human Resources Competence, Regional Financial Accounting Systems, Quality of Regional Government Financial Reports.*

1. Pendahuluan

Menurut [12], Terbentuknya Kota Tangerang Selatan diawali pada akhir tahun 2006 dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menyetujui terbentuknya Kota Tangerang Selatan. Proses terbentuknya diakhiri pada Oktober 2008 yang diresmikan oleh Mardiyanto yang pada saat itu sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia. Kota Tangerang Selatan itu sendiri adalah daerah yang terletak di Provinsi Banten yang merupakan pecahan dari kota Tangerang. Kota ini terbentuk atas daerah otonom pada tahun 2008 berdasar pada Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 mengenai Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Tujuan terbentuknya Kota ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan serta memberikan pemanfaatan potensi daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik agar masyarakat Tangerang Selatan sejahtera.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai kualitas laporan keuangan daerah adalah sebuah kesesuaian dengan standar yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut [13] terdapat penyimpangan anggaran pada LKPD tahun 2017. Penyimpangan tersebut dikemukakan oleh Koordinator Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) Aco Ardiansyah yang mengatakan bahwa beliau melihat indikasi kecurangan karena adanya potensi kerugian negara sebesar Rp 455 juta atas pekerjaan peningkatan jalan, temuan kedua pada anggaran Dinas Bangunan dan Penataan Ruang (DBPR) yang mana terdapat kurangnya pemenuhan spesifikasi dan lambannya pembangunan gedung DPRD, Gedung III Pemkot tahap dua dan gedung SDN 1 Jurang Mangu Barat potensi kerugian atas temuan tersebut sebesar Rp 1 Miliar. Temuan ketiga pada penyimpangan anggaran dari belanja jasa service fiktif sebesar Rp 24 juta dan temuan yang terakhir pada penyimpangan anggaran belanja bahan Dinas Perpustakaan dan arsip daerah dengan nilai kerugian sebesar Rp 199 juta. Diduga penyimpangan tersebut dipengaruhi oleh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang tidak sesuai dengan kapasitas dari daerah tersebut yang berujung menjadi masalah untuk Kota Tangerang Selatan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.

2. Tinjauan Pustaka Dan Lingkup Penelitian

2.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah aktifitas manajerial yang diawali dengan tahap perencanaan, menurut [4] penganggaran dan pelaporan yang menjadi bahan untuk pengambilan keputusan. Pelaporan akuntansi sektor publik memiliki sistematika yang harus dipahami oleh pembuat laporan keuangan agar makna pelaporan tersampaikan oleh pihak-pihak yang mengkonsumsi laporan tersebut, sebagai: akuntabilitas, manajemen, transparansi dan keseimbangan antargenerasi. Tujuan dari pelaporan tersebut adanya penyediaan informasi mengenai kejelasan dana-dana yang telah dialokasikan keberbagai bidang sektor publik

2.2 Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pengertian laporan keuangan menurut [11] PSAK 1 (Revisi 2013) tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan laporan keuangan sebagai suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Berdasarkan definisi tersebut laporan keuangan merupakan informasi tentang kondisi keuangan yang berkaitan dengan posisi dan kinerja keuangan entitas.

2.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut [5] sumber daya manusia atau yang dikenal dengan human resource merupakan kekayaan yang berasal dari manusia yang memiliki akal perasaan, keterampilan dan ilmu pengetahuan yang menciptakan sebuah karya. Potensi sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut.

2.4 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Sistem Akuntansi Pemerintahan merupakan standar yang digunakan suatu pemerintahan daerah untuk menjalankan suatu aktivitas pengumpulan data, pencatatan transaksi, ikhtisar dan pelaporan belanja atau pendapatan daerah.

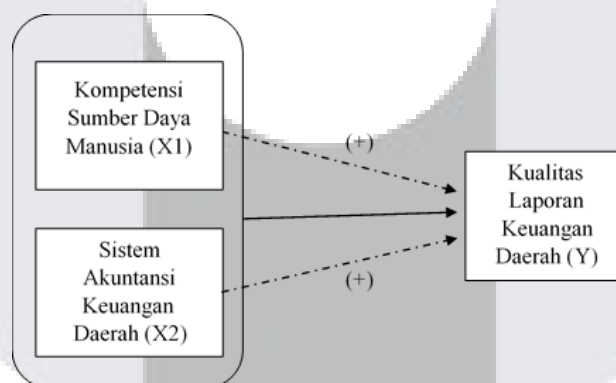
2.5 Kerangka Pemikiran

2.5.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan akuntansi dapat dilihat dari tingkat tanggung jawab sumber daya manusia. Tingkat tanggung jawab dapat dilihat dengan menilai beberapa karakteristik yaitu tingginya integritas, penyelesaian pekerjaan sesuai tanggung jawab dan sesuai target. Di dukung dengan pengalaman kerja serta pelatihan yang pernah diikuti sehingga dapat dinilai sumber daya manusia tersebut dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan. Ketika semakin baiknya kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki SKPD, maka kualitas laporann keuangann yang dihasilkan akan berkualitas baik. Sehingga kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan [1], [6], [2], [3] dan [7] mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam instansi pemerintahan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

2.5.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) diukur dengan melihat apakah pemerintah daerah telah menggunakan proses akuntansi pada SKPD, yaitu: pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan. Penyalahgunaan salah satu proses akuntansi dapat menyebabkan masalah bagi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) misalnya, penyimpangan dana APBD, penggelapan dana masyarakat, penyucian uang dan sebagainya. Tentu saja, apabila hal ini terjadi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak menjadi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Opini yang akan dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bukan lagi Wajar Tanpa Pengecualian. Adanya penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang baik sangat diperlukan sehingga laporan keuangan daerah juga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian yang dilakukan [1], [8], [10] dan [9] yang mengatakan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_1 = Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan.

H_2 = Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan.

H_3 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Tangerang Selatan..

3. Hasil penelitian dan Pembahasan

3.1 Uji Validitas

Pada uji validitas menghasilkan bahwa nilai indeks validitas setiap item pernyataan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) dengan memiliki R-Hitung yang lebih besar dari 0,3 atau $> 0,3$ sehingga dapat disimpulkan bahwa, valid dan layak digunakan.

3.2 Uji Reliabilitas

Pada uji reliabilitas dapat dilihat bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) memiliki nilai Cronbach's Alpha diatas 0,06. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan reliabel.

3.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan sebuah pengujian asumsi dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan model regresi yang baik dan benar-benar mampu memberikan estimasi yang andal dan tidak bias.

Beberapa asumsi yang harus dipenuhi yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, dan Uji Heteroskedastisitas.

3.3.1 Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat dari hasil Asymp. Sig berada diatas 0,05 yang artinya data tersebut berdistribusi normal.

3.3.2 Uji Multikolinearitas

Berdasarkan uji multikolinearitas dengan menggunakan SPSS 25 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas karena nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF yang kurang dari 10. Sehingga tidak terdapat hubungan yang berkaitan kuat antara variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) (X2) dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y).

3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pada uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa model data ini tidak mempunyai heteroskedastisitas karena titik pada gambar tidak berpola, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menandakan bahwa dalam model data, variasi dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lain sama atau konstan. Sehingga dapat disimpulkan tidak adanya heteroskedastisitas atau adanya homoskedastisitas yang telah terpenuhi untuk persamaan regresi

3.4 Uji Hipotesis

3.4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dengan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan software SPSS versi 25, sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM)
Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	0.075	0.016

Kompetensi SDM (X1)	0.124	0.062
Penerapan SAKD (X2)	0.294	0.119
a. Dependent Variable: Y		

Berdasarkan output SPSS yang dihasilkan untuk menguji analisis regresi linear berganda diperoleh hasil a (konstanta) sebesar 0,075 kemudian nilai koefisien regresi b1 0,124 dan nilai b2 0,294 sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda seperti berikut:

$$Y = 0,075 + 0,124 X_1 + 0,294 X_2 + e$$

3.4.2 Analisis Koefisien Korelasi

Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada koefisien korelasi untuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) diperoleh nilai sebesar 0,283 menunjukkan adanya hubungan positif yang rendah. Koefisien korelasi untuk variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) diperoleh nilai sebesar 0,391 menunjukkan adanya hubungan positif yang rendah

3.4.3 Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan pada hasil yang didapat pada pengujian simultan dengan bantuan SPSS diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 artinya lebih kecil daripada nilai 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y).

3.4.4 Uji Parsial (Uji t)

merupakan hasil pengujian Parsial dengan bantuan SPSS diperoleh bahwa tingkat signifikan pada Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) sebesar 0,047 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga, H₀ ditolak dan H_a diterima yang artinya secara parsial variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y).

3.4.5 Koefisien Determinasi (R²)

Pada Perhitungan kali ini diperoleh nilai R² sebesar 0,183. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara variabel bebas, yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Keuangan Daerah secara simultan dengan variabel terikat atau Kualitas Laporan Keuangan Daerah sebesar 18,3%, nilai koefisien determinasi ini terbilang rendah.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Satu indikator yang mendukung bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah juga dibuktikan dengan tingginya tanggapan responden terhadap indikator kompetensi sumber daya manusia sebesar 80,04% yang dapat diartikan bahwa responden setuju bahwa kualitas, kompetensi, keahlian sumber daya manusia yang sesuai dapat membantu dalam menyusun laporan keuangan daerah atau menyelesaikan tugasnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [1], [12], [2], [9] dan [14] mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam instansi pemerintahan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Earning Per Share

Indikator penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sudah mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan. Menurut tanggapan responden tersebut, responden setuju akan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat membantu dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [1], [15], [17] dan [16] yang mengatakan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.5 Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diketahui bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah bagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan. Secara parsial, pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen Kualitas Laba dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi Sumber Daya Manusia secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada bagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.
- b. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada bagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan..

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka terdapat beberapa hal yang hendak disarankan, diantaranya:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam memperdalam pengetahuan mengenai kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan daerah. Bahkan, pengaruh antara kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Serta, diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel bebas lainnya seperti: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Satuan Kerja Perangkat Daerah..

2. Aspek Praktis

Diharapkan agar dapat mempertahankan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya untuk membantu dalam pelaksanaan tugas atau penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan adanya pelatihan internal mengenai pelaksanaan akuntansi berbasis akrual dapat diterapkan, karena didukung dengan banyaknya latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan keuangan pada SKPD kota Tangerang Selatan.

Daftar Pustaka

- [1] Alamsyah, M. R. (2018). Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 201-210.
- [2] Anwar, C., & Mukadarul, D. M. (2016). THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES, COMMITMENT LEADER, THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY, AND SYSTEM INTERNAL CONTROL ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORT. *The Third International Conference on Law, Business and Government* , 30-37.
- [3] Indriasih, D., & Koeswayo, P. S. (2014). THE EFFECT OF GOVERNMENT APPARATUS COMPETENCE AND THE EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL TOWARD THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTING AND ITS IMPACT ON THE PERFORMANCE ACCOUNTABILITY IN LOCAL GOVERNMENT . *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 90-100.
- [4] Mahsun, M. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- [5] Marjuni, S. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Makassar: Sah Media.
- [6] Muda, I. (2017). THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES COMPETENCY AND THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL

REPORT WITH REGIONAL ACCOUNTING SYSTEM AS AN INTERVENING. Journal of Theoretical and Applied Information Technology , 5552-5561.

- [7] Nuryanto, M., & Afiah, N. N. (2013). The Impact of Apparatus Competence, Information Technology Utilization and Internal Control on Financial Statement Quality. *World Review of Business Research*, 157-171.
- [8] Pujanira, P., & Taman, A. (2017). PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Nominal*, 14-28.
- [9]. Rahayu, L. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah . *JOM FEKON*, 1-15.
- [10].]Rahayu, L. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah . *JOM FEKON*, 1-15.
- [11]. Yadiati, W., & Mubarok, A. (2017). *Kualitas Pelaporan Keuangan: Kajian Teoritis dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- [12] Biro Pemerintahan Provinsi Banten. (2019, Maret 9). *Profil Kota Tangerang Selatan*. Retrieved from Sejarah Kota Tangerang Selatan: <https://www.biropemerintahan.bantenprov.go.id>
- [13] Tohir, J. R. (2018, Mei 14). Capaian WTP Pemkot Tangsel Dipertanyakan, TRUTH Ungkap Dugaan Penyimpangan Anggaran Rp 1,7 Miliar. Retrieved from *Tribun Jakarta*: <https://jakarta.tribunnews.com>